

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Achmad Ruslan dan Andi Bau Inggit. 2023. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Adrian Sutedi. 2019. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Sutiyoso. 2007. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasni. 2016. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Menulis Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2019. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- _____. 2016. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Lexi J Moeleng. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Marwan Mas. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miftah Thoha. 2016. *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Muhtar Said. 2019. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*,

Yogyakarta: Thafa Media

Ni'Matul Huda. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.

Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.

Pangerang Moenta dan Syafa'at. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Grafindo.

Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Paranadamedia Group.

Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Suharizal dan Muslim. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.

Sutiyoso Bambang. 2018. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Ull Press.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Fitri Putri Pangestu. 2021. *Pengawasan Pergudangan Di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Muhammad Ardiansyah Natsir. 2016. *Tinjauan Hukum Tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin.

N. F. Y Burhanuddin. 2014. *Pengaruh Pergudangan Dalam Kota Terhadap Sistem Transportasi Studi Kasus: Kecamatan Wajo Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Wiradewa Hadyaka. 2016. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

C. Jurnal:

Ahmad Jazuli. 2017. "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 6 Nomor 2.

B. M. Habibullah Tarigan, Ranty Meilani Putri, dan Arrie Budhiatrie. 2021. "Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang". *Mendapo Journal of Administration Law*. Volume 2 Nomor 1.

Fiti Putri Pangestu, Muh Isa Ansari, dan Ihyani Malik. 2022. "Pengawasan Pergudangan di Kota Makassar". *Jurnal Unismuh*. Volume 3 Nomor 2.

M. Zuhri. 2021. "Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 58 Tahun XIV.

Sylvia Aryani. 2017. "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah". *Jurnal Badamai Law 2*. Volume 2 Nomor 1.

Nahdia Nur, 2016, "Perdagangan dan Ekonomi di Sulawesi Selatan, Pada Tahun 1900-an sampai dengan 1930-an", *Jurnal Ilmu*

Budaya, Volume 4 Nomor 1.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Penataan dan Pembinaan Gudang.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2023.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Gudang.

E. Sumber Internet:

Kristianus Nardi Jaya. 2023. *"Puluhan Ekspedisi Di Wilaya Tallo, Diduga Meresahkan Warga dan Pengguna Jalan"*.
Suaraburuh.com. Edisi Tanggal 1 Maret 2023.

Kristianus Nardi Jaya. 2023. *"Camat Tallo Bakal Kordinasi ke Disperindag dan Satpol PP Untuk Beri Teguran ke Ekspedisi"*.
Suaraburuh.com. Edisi 1 Maret 2023.

Anonim. 2019. *"Pemerintah Kecamatan Tallo Bakal Segel Kendaraan ekspedisi yang Langgar Aturan"*.
Makassarmetro.com. Edisi Tanggal 9 September 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Dinas PM & PTSP Prov. Sulawesi Selatan.

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : http://simap-new.sulseprov.go.id Email : ptsp@sulseprov.go.id Makassar 90231		
Nomor	: 25974/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	
di- Tempat		
Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 6494/un4.5.1/pt.00/2023 tanggal 13 SEPTEMBER 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:		
N a m a	: ADELIA SUSILOWATI AGUNG	
Nomor Pokok	: B021191094	
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar	
PROVINSI SULAWESI SELATAN		
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :		
" IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERIZINAN KEGIATAN PERGUDANGAN DI KOTA MAKASSAR "		
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 18 September s/d 17 November 2023		
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.		
Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 15 September 2023		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN		
		
ASRUL SANI, S.H., M.Si. Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008		
Tembusan Yth		
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;		
2. <i>Pertinggal.</i>		

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Dinas PM & PTSP Kota Makassar.

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171 Website: dpmptsp.makassarkota.go.id</p>	
<u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u> Nomor: 070/455/SKP/SB/DPMPTSP/9/2023		
DASAR:		
<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerahc. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinand. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023e. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/455/SKP/SB/DPMPTSP/9/2023, Tanggal 15 September 2023f. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 456/SKP/RekoTeknis/9/2023		
Dengan Ini Menerangkan Bahwa :		
Nama	:	ADELIA SUSILOWATI AGUNG
NIM / Jurusan	:	B021191094 / Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Lokasi Penelitian	:	Terlampir,-
Waktu Penelitian	:	18 September 2023 - 17 November 2023
Tujuan	:	Skripsi
Judul Penelitian	:	“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERIZINAN KEGIATAN PERGUDANGAN DI KOTA MAKASSAR”
Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:		
<ul style="list-style-type: none">a. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.b. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.c. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.d. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.		
	Ditetapkan di Makassar Pada tanggal: 2023-09-19 11:58:18 Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.	
		
Tembusan Kepada Yth:		
<ul style="list-style-type: none">1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;2. Pertiinggal,-		